

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang terus mengalami perubahan-perubahan yang menuju pada perkembangan baik fisik maupun sosialnya. Perkembangan fisik tergambar dari perkembangan setiap wilayah baik kota maupun desa, dan sosialnya tergambar pada tingkat ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan kota adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan lain dalam waktu yang berbeda.

Pesatnya perkembangan suatu kota dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik seperti : topografi, ketinggian tempat, jaringan jalan, panjang jalan, letak, iklim, sumber daya alam dan faktor-faktor non fisik seperti : pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk, ekonomi yang sangat kompleks di daerah perkotaan. Sesuai dengan pendapat Sughandi (1984) mengatakan “ perkembangan ekonomi, sosial, kelembagaan dan teknologi serta fisik lingkungan itu, saling berkaitan satu sama lain sebagai satu fungsi mekanisme pengembangan wilayah daerah dan kota”.

Dalam dua dekade terakhir ini, kota-kota mengalami perkembangan yang meningkat. Perkembangan ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan penduduk, pesatnya perluasan kota, meningkatkannya perkembangan ekonomi yang ditandai dengan konsentrasi berbagai macam kegiatan ekonomi terutama industri, jasa dan

perdagangan skala besar dan gejala yang paling menarik yaitu trend urbanisasi semakin tinggi (Manning & Effendi, 1985). Oleh karena itu tidak mengherankan, bila ada proyek dari United Nations bahwa tahun 2025 diperkirakan lebih dari dua per tiga ($\frac{2}{3}$) penduduk perkotaan di dunia (70,41%) bermukim di negara-negara berkembang yang paling mengherankan yaitu bahwa pertumbuhan ini diikuti dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Sebagai contoh pada tahun 1950 penduduk diperkotaan 17%, pada tahun 1970 menjadi 24,7% dan terus meningkat yaitu pada tahun 1990 sudah mencapai 37%. Dalam tempo 40 tahun telah mencapai 2 kali lipat, suatu peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang diperkirakan pada tahun 2025 (diperkirakan 240 juta jiwa) mencapai 60% (diperkirakan 144 juta) penduduk sudah tinggal diperkotaan.

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat, terjadi akibat arus urbanisasi ini, telah menjadi masalah di kota-kota besar, terutama berkaitan dengan penyediaan fasilitas, dimana pertumbuhan penduduk yang tinggi seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas sosial ekonomi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini terjadi menjadi permasalahan di dalam pengembangan wilayah, dimana terjadi perbedaan di dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan antardaerah sekitarnya.

Sejalan dengan hal di atas, fasilitas-fasilitas sosial yang terdapat di kota harus memadai dengan kualitas yang baik pula. Kemudahan transportasi dan komunikasi, tersedianya jaminan air bersih (PAM), listrik, pemukiman yang sehat, mudahnya mendapat hiburan, tersedianya tempat-tempat hiburan dan masih banyak lagi merupakan hal yang positif dari adanya perkembangan kota (Tarigan, 1997).

Perkembangan dan ketersediaan berbagai fasilitas kota tentunya didukung oleh langkah-langkah antisipasi pada kemungkinan adanya kerusakan baik akibat pemakaian manusia maupun oleh kerusakan yang disebabkan oleh alam. Menyadari hal itu diharapkan agar dalam pembangunan berbagai fasilitas kota tetap memperhatikan potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerusakan bahkan kehancuran sehingga dapat mengurangi dampak resiko akibat bencana. Mitigasi menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang penganggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana, dalam hal ini bencana gempa bumi, serta bertujuan mengurangi dan mencegah resiko kehilangan jiwa dan harta benda dengan pendekatan struktural dan nonstruktural (Godschalk dkk, 1999).

Negara Indonesia bahkan dunia, beberapa tahun terakhir ini kerap kali dilanda berbagai bencana alam yang silih berganti. Gempa bumi merupakan salah satu bencana yang telah lama menorehkan kekuatan menakjubkan dalam benak manusia. Gempa bumi adalah guncangan pada permukaan bumi yang dihasilkan dari gelombang seismik akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi (Hunt:1984). Bencana gempa bumi banyak mengakibatkan kerugian bagi manusia. Tidak hanya harta benda, jiwa manusia pun dapat terenggut oleh bencana gempa bumi. Manusia tidak dapat mencegah datangnya gempa bumi, tetapi hanya dapat mengantisipasinya sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian yang besar.

Letak Kota Gunungsitoli diantara bidang zona penunjaman (subduksi) lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia menjadikan Kota Gunungsitoli sebagai salah satu wilayah yang berpotensi terjadinya gempa. Berdasarkan data dari BMG

bahwa sejak Desember 2004 sampai Januari 2005 tercatat telah terjadi gempa bumi sebanyak 3.835 kali atau rata-rata 319 kali setiap bulan dengan skala gempa bumi antara 4,5 Skala Rithcer (SR) dengan skala kerusakan I-II MMI pada bulan Januari 2005 sampai dengan 8,7 SR dengan skala MMI VIII-IX pada bulan Maret 2005. Selain itu beberapa kejadian bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Nias seperti yang terjadi pada tahun 1861(8,5 SR), tahun 1907 (8,3 SR), dan pada tanggal 26 Desember 2004 (8,9 SR).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis jumlah penduduk kota Gunungsitoli sebelum gempa adalah 76.017 jiwa yang terus meningkat hingga pada tahun 2010 berjumlah 126.202 jiwa (BPS Kabupaten Nias). Pertambahan penduduk ini tentunya berpengaruh pada ketersediaan fasilitas publik untuk mendukung aktifitas masyarakat. Sebelum Gempa pada bulan Maret 2005, kota Gunungsitoli memiliki berbagai fasilitas berupa bangunan seperti rumah sakit 1 unit, sarana pendidikan berupa TK 11 sekolah, SD 62 Sekolah, SMP 14 sekolah, SMA 13 sekolah dan 4 perguruan tinggi dan sarana lainnya (BPS Kabupaten Nias).

Kota Gunungsitoli merupakan salah satu kota di wilayah kepulauan di pesisir Barat Pulau Sumatera, dan termasuk daerah tertinggal di wilayah pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Posisi geografisnya yang terpisah dari daratan pulau Sumatera, terkesan terisolir dari berbagai aktivitas, sehingga akselerasi pembangunan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan relatif tertinggal dari daerah lain. Upaya-upaya memperbesar akses pembangunan di kota Gunungsitoli melalui penetapan sejumlah kebijakan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan terus dilakukan. Namun demikian, hingga bergulirnya otonomi daerah, kota Gunungsitoli belum mampu membebaskan diri dari ketertinggalan dan belenggu kemiskinan.

Keadaan ini semakin diperburuk dengan bencana alam yang melanda kota Gunungsitoli pada tahun 2005 yang lalu, telah mengakibatkan infrastruktur strategis dan sarana prasarana lainnya mengalami kehancuran atau kerusakan. Kondisi ini menimbulkan dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat kehilangan akses dalam memenuhi berbagai kebutuhan sosial.

Untuk membangun kembali kerusakan akibat kejadian bencana alam di Kota Gunungsitoli, Pemerintah Pusat telah menempuh kebijakan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam dengan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias yang masa tugasnya telah berakhir pada April 2009. Pasca pengakhiran tugas BRR NAD-Nias di Kota Gunungsitoli selanjutnya oleh Pemerintah Daerah melanjutkan proses tersebut ke arah fase pembangunan regular. Pembangunan Kota Gunungsitoli pasca gempa ini perlu untuk dipelajari dalam hal perkembangan dan ketersediaan fasilitas kota yang mendukung pada kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang nantinya akan menentukan perkembangan suatu wilayah perkotaan.

B. Identifikasi Masalah

Masalah penyediaan fasilitas kota tidak terlepas dari ruang kota. Pertambahan penduduk di Kota Gunungsitoli yang meningkat adalah pertumbuhan penduduk yang alami dan juga diakibatkan oleh urbanisasi. Peristiwa gempa pada tahun 2005 telah mengakibatkan infrastruktur strategis dan sarana prasarana lainnya mengalami kehancuran atau kerusakan. Kondisi ini menimbulkan dampak yang sangat meluas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat

kehilangan akses dalam memenuhi berbagai kebutuhan sosial dasarnya. Peristiwa gempa ini tentunya menimbulkan masalah pada ketersediaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ketahun.

Ketersediaan fasilitas-fasilitas kota yang dibutuhkan seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana keagamaan dan sarana perbelanjaan dan niaga, sudah menjadi sebuah keharusan dalam menunjang aktifitas kehidupan masyarakat. Pada dasarnya keberadaan fasilitas kota merupakan faktor penarik terhadap penduduk dan fungsi-fungsi kota untuk datang ke arahnya. Perkembangan dan ketersediaan fasilitas kota tersebut semakin bertambah dengan upaya-upaya rehabilitasi atau pembangunan kembali serta upaya pencegahan atau antisipasi terhadap potensi bencana dikemudian hari dan ini merupakan masalah dalam perkembangan suatu wilayah kota.

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi objek penelitian agar lebih terarah. Maka penulis membatasi masalah pada perkembangan sarana pendidikan (SD, SMP, SMA), sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan apotik), sarana keagamaan (mesjid, gereja, vihara), dan sarana perbelanjaan dan niaga (pasar, bank, koperasi dan toko). Serta ketersediaan fasilitas kota di Kota Gunungsitoli pasca gempa tahun 2005.

D. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan fasilitas kota (sosial dan ekonomi) di Kota Gunungsitoli pasca gempa tahun 2006 – 2010 ?
2. Bagaimana ketersediaan fasilitas kota (sosial dan ekonomi) di Kota Gunungsitoli pasca gempa tahun 2006 – 2010 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan fasilitas kota (sosial dan ekonomi) di Kota Gunungsitoli pasca gempa Tahun 2006 – 2010.
2. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kota (sosial dan ekonomi) di Kota Gunungsitoli yang dibangun pasca gempa tahun 2006 – 2010.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan, khususnya pemerintah kota Gunungsitoli dalam rangka pengembangan fasilitas kota pasca gempa.
2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama namun pada lokasi yang berbeda.
3. Menambah wawasan penulis tentang perkembangan kota Gunungsitoli.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana pendidikan di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan.